

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 22

BPK Awasi Dana Pendidikan

SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan ketat mengawasi pemakaian anggaran negara yang dikucurkan untuk kepentingan publik. Salah satunya, pada sektor pendidikan yang menyerap hingga 20 persen pembiayaan APBN. Menurut Ketua BPK Harry Azhar Azis, anggaran yang diperuntukkan pendidikan nasional, jumlahnya sangat besar.

"Nilainya bahkan seperlima dari APBN setiap tahunnya. Padahal asumsi APBN Indonesia, angkanya dapat mencapai Rp 2.000 Triliun. Bagaimanapun, butuh dilakukan pengawasan bersama supaya anggaran itu, terserap dengan baik bermanfaat penuh untuk rakyat," tuturnya saat memberikan kuliah umum di Unissula kemarin.

Forum itu, dibuka resmi

Rektor Anis Malik Thoha PhD. Hadir pula Wakil Rektor I Dr M Hadin, Wakil Rektor II Dr Indri Kartika dan Dekan Fakultas Ekonomi Olivia Fachrunissa PhD.

Disebutkan kendati menyerap anggaran besar pihaknya memberikan catatan. Misalnya berdasarkan data yang dirilis lembaga UNDP, nilai *human development index* (HDI) Indonesia belum terlalu tinggi. Tahun 2014 bangsa ini bahkan berada di urutan 110 dari 188 negara yang di survei. Skor Indonesia, juga tak lebih dari 0,684. Posisi ini tak bergeser di kawasan ASEAN.

Indeks

Peringkat pertama indeks pembangunan manusia (IPM) adalah Singapura (0,912), Brunei (0,856), Malaysia (0,779), dan Thailand (0,726). Indonesia

hanya unggul dari Filipina (0,668), Vietnam (0,666), Laos (0,575), Kamboja (0,555), dan Myanmar (0,436).

"Ini sepertinya menunjukkan pengaruh dari alokasi 20 persen anggaran sektor pendidikan belum signifikan. Data *world economic forum* (WEF) 2016-2017 bahkan menunjukkan peringkat sumber daya manusia (SDM) Indonesia merosot tajam. Dari urutan 37 di tahun 2015 menjadi 41 di 2016," urainya.

Bangsa ini juga kalah peringkat dibanding Malaysia di peringkat 25. Atau juga Korea Selatan (26), China (28), Jepang (8), dan Thailand (34). Pada konteks perguruan tinggi (PT) khususnya negeri sebagai pengelola keuangan negara tentu sangat berkaitan dengan dana ini. Dia pun meminta pengelola hati-



SM/Hari Santoso

KULIAH UMUM : Ketua BPK Harry Azhar Azis menyampaikan kuliah umum di Unissula kemarin. (21)

hati dengan meningkatkan sistem pengendalian internal (SPI) supaya uang rakyat dapat dipakai

secara benar. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. (H41-21)